



WALIKOTA PEKALONGAN

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2013**

TENTANG

**REKENING TABUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, Bendahara Umum Daerah berwenang untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam rangka pelaksanaan APBD, Rekening Tabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota–Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG REKENING TABUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Tahun Anggaran adalah meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
14. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah pengurang nilai kekayaan bersih.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. sebagai pedoman pelaksanaan APBD Kota Pekalongan;
- b. pelaksanaan fungsi-fungsi pengurusan keuangan daerah diselenggarakan sebagaimana mestinya;
- c. sebagai alat pengendali dan pengawasan/pemeriksaan penatausahaan pelaksanaan APBD.

BAB III
PELAKSANAAN APBD
Pasal 3

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 4

- (1) BUD membuka rekening kas umum daerah pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan dalam rangka melaksanakan APBD Kota Pekalongan.
- (2) Bendahara Pengeluaran SKPD membuka rekening tabungan pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan untuk menampung pemindahan dana yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan.
- (3) Daftar rekening-rekening tabungan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Pada setiap akhir bulan, PT. Bank Jateng wajib memindahbukukan pendapatan bunga yang terdapat pada rekening-rekening tabungan SKPD ke rekening kas umum daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal SKPD membuka rekening lain guna pelaksanaan APBD selain rekening tabungan yang tercantum dalam Lampiran ini, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang wajib melaporkan ke Walikota melalui BUD.
- (2) Pendapatan bunga yang diperoleh dari pembukaan rekening sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disetorkan oleh SKPD ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rekening Tabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2013

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap
ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2013



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 7

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 7 TAHUN 2013
 TENTANG REKENING TABUNGAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

**DAFTAR REKENING TABUNGAN SKPD
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

No.	SKPD	REKENING TABUNGAN
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	2-007-01500-6
2	Bagian Umum dan Keuangan Setda Kota Pekalongan	2-007-01566-9
3	Bagian Kesra Setda Kota Pekalongan	2-007-01572-3
4	Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan	2-007-01567-7
5	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Pekalongan	2-007-01574-0
6	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Pekalongan	2-007-01573-1
7	Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan	2-007-01568-5
8	Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Pekalongan	2-00701569-3
9	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	2-007-01571-5
10	Sekretariat DPRD	2-007-01501-4
11	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	2-007-01502-2
12	Badan Penanaman Modal&Pelayanan Perijinan Terpadu	2-007-01503-1
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	2-007-01504-9
14	Inspektorat	2-007-01505-7
15	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	2-007-01506-5
16	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	2-007-01507-3
17	Kecamatan Pekalongan Timur	2-007-01508-1
18	Kecamatan Pekalongan Barat	2-007-01509-0
19	Kecamatan Pekalongan Utara	2-007-01510-3
20	Kecamatan Pekalongan Selatan	2-007-01511-1
21	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2-007-01512-0
22	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	2-007-01513-8
23	Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan	2-007-01514-6
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	2-007-01515-4
25	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2-007-01516-2
26	Dinas Kesehatan	2-007-01517-1
27	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2-007-01518-9
28	UPTD Pendidikan Kec. Pekalongan Timur	2-007-01520-1
29	UPTD Pendidikan Kec. Pekalongan Barat	2-007-01521-9
30	UPTD Pendidikan Kec. Pekalongan Utara	2-007-01522-7
31	UPTD Pendidikan Kec. Pekalongan Selatan	2-007-01523-5
32	SMPN 01 Pekalongan	2-007-01524-3
33	SMPN 02 Pekalongan	2-007-01525-1
34	SMPN 03 Pekalongan	2-007-01526-0
35	SMPN 04 Pekalongan	2-007-01527-8

36	SMPN 05 Pekalongan	2-007-01528-6
37	SMPN 06 Pekalongan	2-007-01529-4
38	SMPN 07 Pekalongan	2-007-01530-8
39	SMPN 08 Pekalongan	2-007-01531-6
40	SMPN 09 Pekalongan	2-007-01532-4
41	SMPN 10 Pekalongan	2-007-01533-2
42	SMPN 11 Pekalongan	2-007-01534-1
43	SMPN 12 Pekalongan	2-007-01535-9
44	SMPN 13 Pekalongan	2-007-01536-7
45	SMPN 14 Pekalongan	2-007-01537-6
46	SMPN 15 Pekalongan	2-007-01538-3
47	SMPN 16 Pekalongan	2-007-01539-1
48	SMPN 17 Pekalongan	2-007-01541-3
49	SMAN 01 Pekalongan	2-007-01542-1
50	SMAN 02 Pekalongan	2-007-01543-0
51	SMAN 03 Pekalongan	2-007-01544-8
52	SMAN 04 Pekalongan	2-007-01545-6
53	SMKN 01 Pekalongan	2-007-01546-4
54	SMKN 02 Pekalongan	2-007-01547-2
55	SMKN 03 Pekalongan	2-007-01548-1
56	Dinas Pekerjaan Umum	2-007-01549-9
57	Dinas Perhubungan dan Pariwisata dan Budaya	2-007-01550-2
58	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2-007-01555-3
59	Badan Kepegawaian Daerah	2-007-01554-5
60	Kantor Ketahanan Pangan	2-007-04357-3
61	Rumah Sakit Umum Daerah Bendan	2-007-02406-4
62	Kantor Lingkungan Hidup	2-007-01553-4
63	Dinas Komunikasi dan Informatika	3-007-11436-1
64	Bantuan Keuangan DPPKAD Kota Pekalongan	2-007-01628-2
65	Kelurahan Kraton Lor	2-007-05674-8
66	Kelurahan Dukuh	2-007-05635-7
67	Kelurahan Panjang Baru	2-007-05668-3
68	Kelurahan Kradenan	2-007-05650-1
69	Kelurahan Banyurip Alit	2-007-05666-7
70	Kelurahan Kuripan Kidul	1-007-00920-9
71	Kelurahan Kebulen	2-007-05655-1
72	Kelurahan Medono	2-007-05640-3
73	Kelurahan Podosugih	2-007-05639-0
74	Kelurahan Keputran	2-007-05645-1
75	Kelurahan Sampangan	2-007-05624-1
76	Kelurahan Klego	2-007-05633-1
77	Kelurahan Krapyak Kidul	2-007-06107-5
78	Kelurahan Krapyak Lor	2-007-06119-9
79	Kelurahan Kandang Panjang	2-007-06119-9
80	Kelurahan Panjang Wetan	2-007-06106-7
81	Kelurahan Degayu	2-007-06063.0
82	Kelurahan Pabean	2-007-06126-1
83	Kelurahan Bandengan	2-007-06087-7
84	Kelurahan Banyurip Ageng	2-007-06090-7

85	Kelurahan Buaran	2-007-06099-1
86	Kelurahan Jenggot	2-007-06096-6
87	Kelurahan Kertoharjo	2-007-06098-2
88	Kelurahan Kuripan Lor	2-007-06094-0
89	Kelurahan Yosorejo	2-007-06101-6
90	Kelurahan Duwet	2-007-06103-2
91	Kelurahan Soko	2-007-06110-5
92	Kelurahan Sapuro	2-007-06066-4
93	Kelurahan Kergon	2-007-06073-7
94	Kelurahan Bendan	3-007-13125-8
95	Kelurahan Kramat Sari	2-007-06108-3
96	Kelurahan Kraton Kidul	2-007-06095-8
97	Kelurahan Tirto	2-007-06085-1
98	Kelurahan Tegalrejo	2-007-06132-6
99	Kelurahan Bumirejo	2-007-06102-4
100	Kelurahan Pringlangu	2-007-06176-8
101	Kelurahan Pasir Sari	2-007-06069-9
102	Kelurahan Landungsari	2-007-06086-9
103	Kelurahan Noyontaan	2-007-06074-5
104	Kelurahan Kauman	2-007-06061-3
105	Kelurahan Sugih Waras	2-007-06072-9
106	Kelurahan Poncol	2-007-06091-5
107	Kelurahan Gamer	2-007-06092-3
108	Kelurahan Dekoro	2-007-06167-9
109	Kelurahan Karang Malang	2-007-06083-4
110	Kelurahan Baros	2-007-06112-1
111	Kelurahan Sokorejo	2-007-06111-3
112	Rek Penerimaan PBB Kota Pkl	1-007-00359-1



WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD